

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I menguraikan latar belakang penelitian mengenai pengembangan Desa Wisata Pancoh, Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam konteks penerapan *green economy* sebagai manifestasi pariwisata berkelanjutan. Pada bagian ini, peneliti menegaskan adanya kesenjangan yang teridentifikasi melalui data empiris dari penelitian terdahulu, sekaligus menunjukkan perbedaan perspektif dan fokus kajian yang menjadi dasar penelitian ini. Selain itu, Bab I juga memuat perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan, baik secara teoritis maupun praktis.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Konsep pendekatan pertumbuhan (*developmentalism*) yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia telah membawa pengaruh pada kuantitas dan kualitas kekayaan alam. Pendayagunaan lingkungan alam melalui eksplorasi serta adanya kecenderungan eksploitasi guna kegiatan pembangunan kadang melupakan kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tindakan pelanggaran tersebut menyebabkan sejumlah permasalahan lingkungan yang dihadapi saat ini mencakup beragam aspek, antara lain polusi air dan udara, penurunan kualitas tanah, kebakaran serta kerusakan hutan, perubahan iklim, hingga konversi lahan pertanian ke fungsi lain. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan kompleksitas tantangan ekologis yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap keberlanjutan pembangunan, sehingga memerlukan perhatian serius dalam kerangka penelitian dan perumusan kebijakan (Nurlinda, 2016). Selain itu, permasalahan lingkungan juga dipengaruhi oleh perubahan iklim yang terjadi di tingkat global, yaitu perubahan pola cuaca dan suhu udara dalam jangka panjang. Penyebab utama perubahan iklim telah

berlangsung sejak awal abad ke-19, yang terutama dipicu oleh aktivitas pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Proses industrialisasi yang masif pada periode tersebut menjadi salah satu faktor utama meningkatnya emisi karbon di atmosfer, sehingga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap sistem iklim global, khususnya pada proses industrialisasi dan transportasi yang menghasilkan emisi berbagai gas (P. Purwanto, 2025). Emisi gas rumah kaca yang kemudian meningkatkan suhu Bumi merupakan hasil dari pembakaran bahan bakar fosil. Penghasil emisi utama misalnya bensin untuk menjalankan kendaraan, batu arang guna memanaskan gedung, pembukaan lahan dan hutan, ataupun tempat pembuangan sampah yang menghasilkan gas metan dan karbon dioksida

Kelangkaan air, penurunan keanekaragaman hayati, badai besar, degradasi lapisan es, peningkatan muka air laut, dan limbah genangan air adalah beberapa konsekuensi dari perubahan iklim. Ribuan ilmuwan dan peninjau pemerintah menyetujui dalam laporan PBB tahun 2018 bahwa kenaikan suhu global perlu dibatasi pada 1,5°C. Tiga kategori aksi utama yang disepakati secara internasional dalam kerangka Perjanjian Paris 2015 untuk menghadapi krisis iklim adalah: satu, mengurangi emisi sebagai langkah untuk membatasi pemanasan global dengan menekan jumlah gas rumah kaca di atmosfer, seperti penggunaan energi terbarukan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Dua, adaptasi dengan dampak iklim, yaitu menyesuaikan diri dengan perubahan yang sudah atau akan terjadi seperti kenaikan permukaan laut atau cuaca ekstrem guna melindungi masyarakat dan ekosistem. Tiga, penyediaan dukungan finansial terutama bagi negara berkembang, agar mampu melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi yang diperlukan (PBB, 2024).

Tantangan pembangunan yang mampu mengembangkan perekonomian tanpa menyebabkan berbagai kerusakan atau masalah lingkungan memunculkan gagasan pembangunan berkelanjutan yang dipahami sebagai suatu proses pertumbuhan ekonomi

disertai dengan upaya menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Konsep ini menekankan pentingnya strategi yang mampu menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkesinambungan oleh generasi sekarang maupun mendatang. Dalam pengelolaan sumber daya, elemen keselarasan dan keseimbangan menjadi sangat penting. Dua prinsip utama, yakni prinsip ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup manusia, serta prinsip pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk menciptakan kondisi ekologis yang kondusif. Kedua prinsip tersebut menjadi pijakan dalam merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai terwujudnya lingkungan ekologi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat (Burhanuddin, 2016). Definisi pembangunan berkelanjutan menurut Pasal 1 angka 3 UU PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, serta menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini maupun generasi mendatang. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian ekologi, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan kualitas hidup secara intergenerasional.

United Nations Environment Program (UNEP) mengungkapkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui model *green economy* (Kusumaningrum & Safitra, 2020). Pengertian *green economy* adalah model ekonomi yang meningkatkan derajat taraf hidup manusia secara berkeadilan sosial sembari mengurangi risiko lingkungan serta kelangkaan ekologis (P. Purwanto, 2021). Konsep

tersebut mengarahkan industri guna melakukan efisiensi sumber daya, produksi rendah karbon, serta inklusif secara sosial. Pariwisata menjadi salah satu dari 11 sektor industri yang tercakup dalam transisi pengembangan *green economy*. Fokus bidang pariwisata adalah pariwisata berkelanjutan serta transformasi menuju *green economy* pada tingkat nasional dan global (Komala et al., 2013).

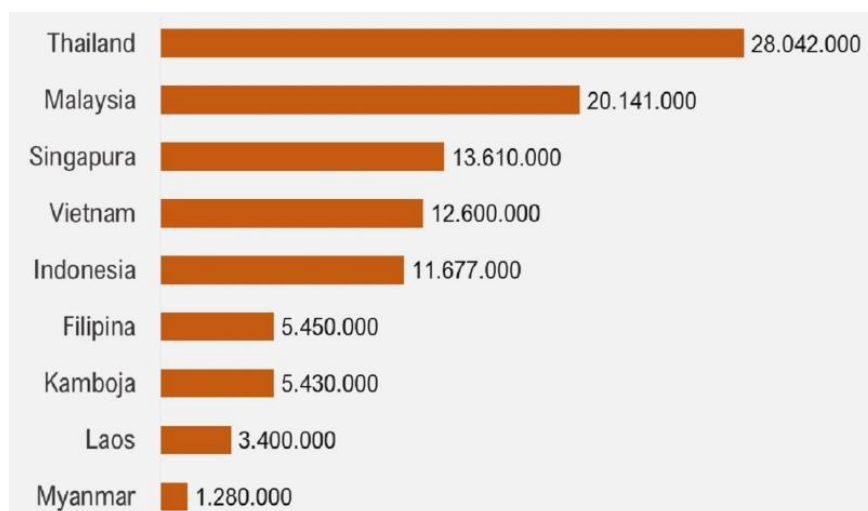
Industri pariwisata saat ini banyak ditawarkan melalui berbagai macam destinasi wisata berupa atraksi budaya, pemandangan alam, kuliner, maupun olahraga yang menantang adrenalin. Banyaknya pilihan destinasi wisata ini menjadi bagian dari upaya membangun daerah wisata berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam konsideran Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, dinyatakan bahwa Pembangunan kepariwisataan hendaknya berlandaskan pada keanekaragaman, keunikan, serta kekhasan budaya dan alam, dengan tetap memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata perlu dirancang secara terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, sehingga mampu menjamin keberlangsungan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis secara berkesinambungan.

Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan sejalan dengan indikator Capaian ke-9 dari Tujuan ke-8 *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030, yakni tercapainya sasaran dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan mendorong pariwisata berkelanjutan, sekaligus menciptakan peluang kerja serta mempromosikan produk lokal dan budaya. Paradigma pariwisata berkelanjutan yang dimaksud adalah bekerja pada 3 (tiga) bidang, yaitu ekonomi, sosial budaya serta lingkungan. Dalam bidang ekonomi, hal ini mencakup keuntungan ekonomi yang merata

dan berkeadilan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, menyediakan peluang kerja yang stabil dan pendapatan bagi masyarakat lokal, mendukung pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pariwisata dan menjamin operasi ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Pada aspek lingkungan, yaitu memanfaatkan sumber daya lingkungan secara optimal tanpa melebihi kemampuan regenerasi sumber daya tersebut, melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati, memelihara proses ekologi yang penting untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara cukup serta optimal guna menjaga keberlanjutan untuk generasi mendatang, tidak merusak lingkungan alam dan menjaga keanekaragaman hayati. Selanjutnya, pada aspek sosial budaya, yaitu menghormati dan mengakui keaslian sosial budaya masyarakat lokal, termasuk warisan budaya dan nilai-nilai tradisional, meningkatkan pengetahuan antarbudaya serta toleransi melalui interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, memberikan manfaat sosial kepada masyarakat setempat, seperti peningkatan kualitas hidup dan layanan sosial, melibatkan masyarakat daerah dalam pengembangan pariwisata secara langsung dan tidak langsung, dan menjaga harmoni antara masyarakat lokal, kebutuhan wisatawan, dan lingkungan. (Amerta et al., 2018). Seluruh dimensi tersebut harus seimbang guna memastikan keberlanjutan pariwisata dalam jangka panjang.

Pariwisata telah berkembang menjadi aktivitas ekonomi terbesar di dunia. Ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan peluang kerja, investasi modal, dan kontribusi pajak. Wheatcroft menyebutkan bahwa negara di dunia ketiga menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan untuk memperoleh pendapatan dan pengembangan regional (Damanik, J. et al., 2015). Salah satu indikator keberhasilan yang dapat diukur dari daya tarik wisata tersebut adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Menurut Analisis Global Data, jumlah kunjungan wisatawan di kawasan ASEAN terus mengalami

peningkatan sebesar 4,27%. Tingkat kunjungan wisatawan tertinggi di ASEAN pada tahun 2023 secara berurutan ditempati oleh negara-negara sebagai berikut:

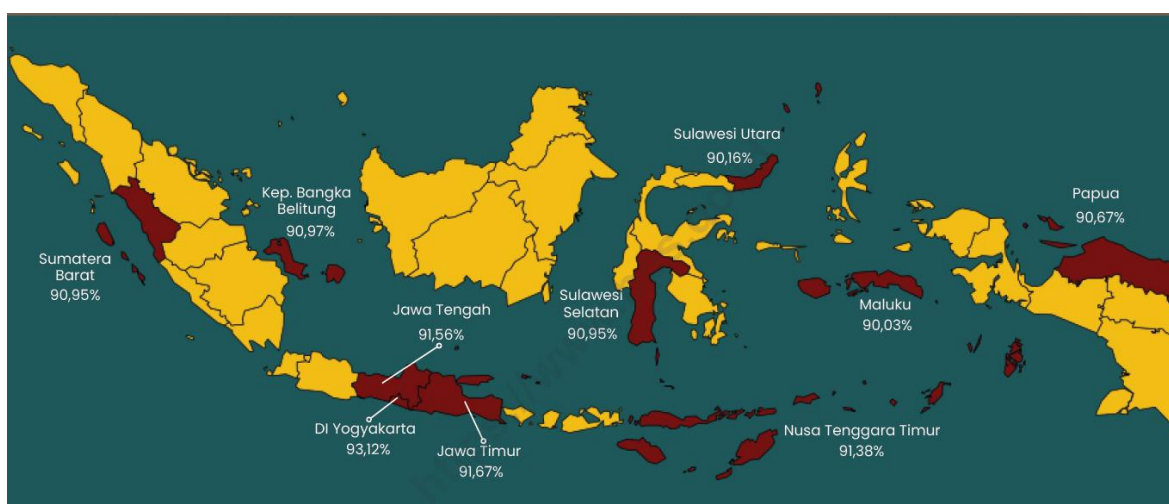


Gambar 1. 1
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Negara ASEAN
Sumber: (Rahadiansyah, 2024)

Berdasarkan Gambar 1.1. di atas, jumlah keseluruhan kunjungan turis mancanegara ke Indonesia berada di urutan kelima di antara negara-negara di ASEAN. Indonesia berhasil meningkatkan kunjungan turis asingnya menjadi 11,6 juta pada tahun 2023 dari 5,8 juta pada tahun 2022, meskipun angka tersebut masih di bawah pencapaian 2019 yang melampaui 16 juta turis mancanegara. Sektor pariwisata telah memberikan kontribusi ekonomi secara nasional. Tahun 2022 sektor pariwisata dapat menghasilkan Produk Domestik Bruto pariwisata sebanyak Rp842.303,16 miliar atau 4,3 persen, devisa pariwisata sebesar USD 4.260 juta, dan tenaga kerja pariwisata per tahun 2021 mampu menyerap 21,26 juta orang (BK DPR, 2023).

Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) mencatat kunjungan wisatawan di Indonesia pada tahun 2022 masih didominasi oleh wisatawan domestik. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kunjungan terbanyak wisatawan nusantara dengan jumlah perjalanan sebanyak 155,49 juta atau setara 25,79% dari total perjalanan. Provinsi ke-2 dengan jumlah

sebanyak 146,02 juta perjalanan diraih oleh Provinsi Jawa Tengah. Persentasenya mencapai 24,22% dari total perjalanan wisatawan nusantara tahun sebelumnya. Selanjutnya ditempati oleh Provinsi Jawa Barat mencatat sejumlah 95,19 juta kunjungan perjalanan wisatawan nusantara. Perjalanan wisatawan domestik berikutnya terletak pada Provinsi Banten dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yakni masing-masing sebanyak 37,36 juta perjalanan dan 36,73 juta perjalanan. Lalu, **Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 22,22 juta** kunjungan. Selanjutnya, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Barat. Di sisi lain, 63,75 juta perjalanan merupakan perjalanan wisatawan lokal di provinsi lainnya. Lebih lengkap dijabarkan pada Gambar 1.2. di bawah ini:



Gambar 1. 2

10 Provinsi Tujuan Perjalanan Wisatawan Dengan Tingkat Kepuasan Terbaik Tahun 2025
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2025)

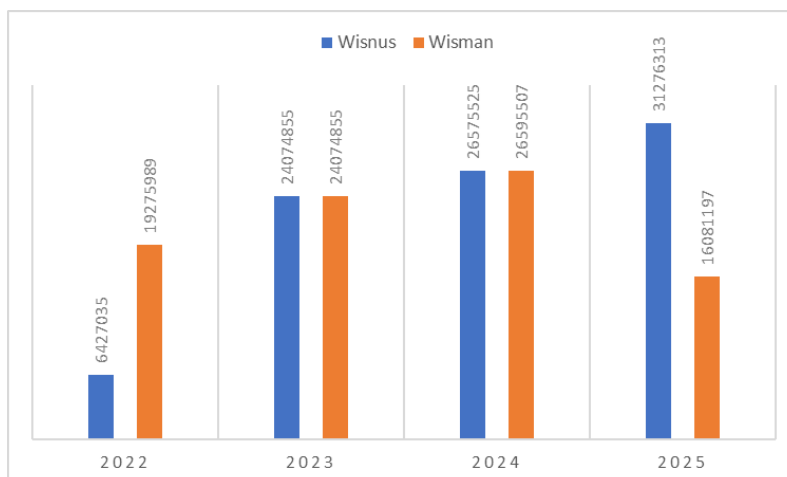
Berdasarkan Gambar 1.2. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati posisi pertama dalam jumlah wisatawan yang mendapatkan penilaian terbaik dari tingkat kepuasan. Maksud dan tujuan wisatawan tersebut adalah berlibur, mudik/pulang kamung, dan keagamaan. Ditinjau dari destinasi wisata terbaik di Indonesia tahun 2025 terdapat 10 lokasi pilihan wisatawan yang dapat dilihat dalam Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1. 1
Daerah Lokasi Wisata Terbaik di Indonesia Tahun 2025

No	Daerah Lokasi Wisata	Provinsi
1	Raja Ampat	Papua Barat Daya
2	Labuhan Bajo dan Taman Nasional Komodo	Nusa Tenggara Timur
3	Candi Borobudur	Jawa Tengah
4	Gunung Bromo	Jawa Timur
5	Danau Toba dan Pulau Samosir	Sumatera Utara
6	Ubud	Bali
7	Lombok dan Gili Trawangan	Nusa Tenggara Barat
8	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
9	Pulau Belitung	Bangka Belitung
10	Tana Toraja	Sulawesi Selatan

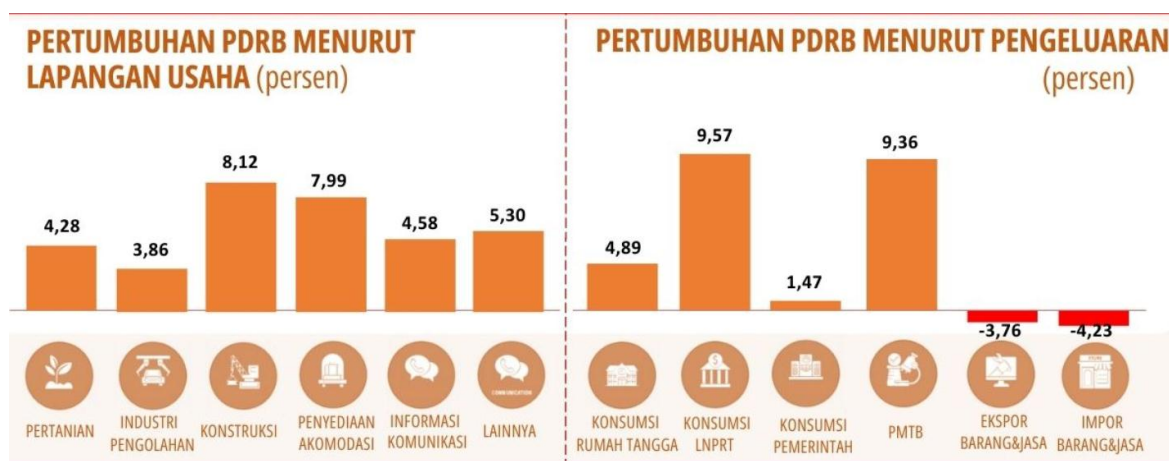
Sumber: (Kemenparekraf, 2025)

Dilihat dari tabel tersebut, Pemerintah Daerah DIY mempunyai tantangan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata di DIY yang menurut perspektif pengunjung lebih menarik dari aspek lingkungan dan budayanya. Total kunjungan wisata DIY mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 7,83% setiap tahun. Data pergerakan kunjungan wisatawan sejak tahun 2022 – 2025 dapat dilihat dalam Gambar 1.3. berikut :



Gambar 1. 3
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke DIY Tahun 2022-2025
Sumber: (Dinas Pariwisata DIY, 2025)

Kunjungan wisatawan ke DIY masih didominasi oleh pengunjung domestik dibandingkan dengan wisatawan asing, seperti yang tertera pada Gambar 1.3. Di seluruh Kabupaten/Kota di DIY tersebar sejumlah 215 destinasi wisata. Saat ini, destinasi tersebut mulai populer serta kerap menjadi tujuan kunjungan wisatawan pada musim libur panjang, misalnya libur akhir tahun maupun lebaran serta libur cuti bersama (Hadi & Widyaningsih, 2020). Dinas Pariwisata DIY telah mencatat sejumlah daya tarik objek wisata, termasuk wisata alam, budaya, buatan, serta desa/kampung wisata. Tingginya minat wisatawan terhadap DIY mendorong pertumbuhan DIY. Badan Pusat Statistik DIY (2026) menjelaskan bahwa kontribusi terbesar perekonomian daerah ditopang oleh 5 sektor strategis, yaitu konstruksi, penyediaan akomodasi, pertanian, informasi dan komunikasi, industri pengolahan. Dan lain-lainnya. Meskipun demikian, sebagian besar sektor tersebut memiliki keterkaitan yang erat serta sulit dipisahkan dari pengaruh industri pariwisata.



Gambar 1. 4
Pertumbuhan PDRB DIY Tahun 2025
Sumber: (Pradana, 2021)

Penyumbang pendapatan pada sektor industri pengolahan didominasi oleh industri kuliner dengan pemasukan yang sangat mengandalkan pada sektor pariwisata. Industri makanan oleh-oleh seperti bakpia, sangat menggantungkan pemasukkan pada jumlah pengunjung

yang datang ke Yogyakarta. Demikian pula, industri kerajinan turut menyumbang pemasukan yang cukup masif serta menggantungkan pasar pada wisatawan. Data di atas juga menunjukkan bahwa sektor pertanian pada kuartal IV tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,19% pun tetap dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Sektor pertanian hortikultura, seperti buah dan sayuran, umumnya berperan sebagai pemasok kebutuhan bagi hotel dan restoran di Yogyakarta. Demikian juga, meskipun tampak seperti pendapatan sektor pendidikan hanya berasal dari SPP, kenyataannya sektor pendidikan juga terkait erat dengan pariwisata. Hal demikian dibuktikan pada periode wisuda atau pada musim liburan, biasanya keluarga dan saudara para wisudawan akan datang sekaligus berwisata. Hal ini meningkatkan pendapatan pada sektor pariwisata, termasuk pendukungnya, misalnya jasa transportasi, *laundry* dan usaha kuliner. Hal serupa juga berlaku di sektor konstruksi, yang mana mayoritas pembangunan ditujukan untuk menunjang sektor pariwisata. Misalnya, pembangunan akomodasi seperti pembangunan hotel dan *resor*, pembangunan dan perbaikan jalan guna memudahkan akses ke lokasi wisata, serta pembangunan objek-objek pariwisata tersebut. Dengan kata lain, perekonomian DIY di sisi hilir memang dipengaruhi oleh sektor-sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan pariwisata, meliputi transportasi, hotel dan restoran, serta akomodasi. Keterhubungan antarsektor ini menunjukkan adanya hubungan saling mendukung dalam membentuk ekosistem pariwisata yang utuh.

Mengingat peran pariwisata yang strategis dalam pembangunan DIY, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan pembangunan pariwisata di daerah di antaranya menciptakan industri pariwisata yang memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian lokal melalui peningkatan investasi, kerja sama bisnis, pembukaan lapangan pekerjaan, dan

pelaksanaan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, perlu dikembangkan lembaga serta sistem tata kelola yang memungkinkan pertumbuhan industri pariwisata, destinasi wisata, serta promosi wisata yang dikelola secara profesional.

Upaya pelestarian lingkungan yang tercantum dalam tujuan pembangunan pariwisata tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada bagian Ketentuan Umum, disebutkan bahwa perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan tujuan utama menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem serta mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Proses ini mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum, sehingga keseluruhan mekanisme pengelolaan dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Kabupaten Sleman memiliki potensi daya tarik paling beragam di antara kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai destinasi yang ditawarkan meliputi wisata alam, atraksi budaya, dan wisata buatan (Septio & Karyani, 2020). Total wisatawan yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Sleman pada tahun 2025 mencapai 38%, serta merupakan tertinggi di antara kabupaten/kota se-DIY. Jumlah wisatawan terdiri dari turis asing dengan total 223.643 orang serta pengunjung domestik dengan total 5.884.157 orang atau 96,34%. Hal ini menandakan bahwa potensi wisatawan Nusantara merupakan segmen pasar untuk wisata di wilayah Sleman. Total wisatawan yang datang ke Kabupaten/Kota se DIY tahun 2025 dijabarkan melalui tabel berikut:

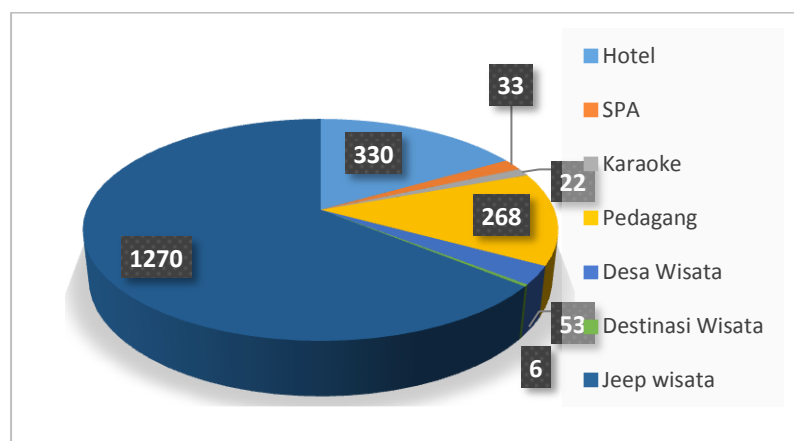
Tabel 1. 2
Jumlah Wisatawan per Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase
1.	Sleman	6.107.800	38%

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase
2.	Bantul	3.404.660	21%
3.	Yogyakarta	3.146.634	20%
4.	Gunung Kidul	2.531.083	16%
5.	Kulonprogo	891.020	6%
	Jumlah	16.081.197	100%

Sumber: (Bappeda DIY, 2025)

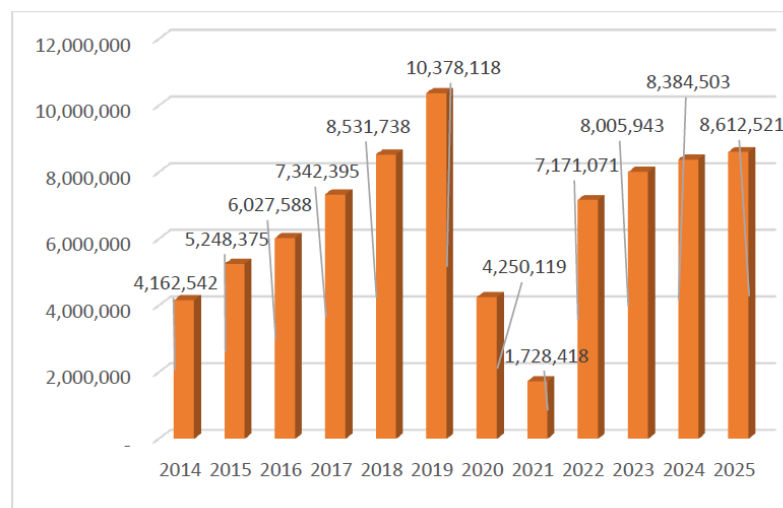
Peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Sleman terjadi pascapandemi. Kejadian Covid-19 sejak tahun 2020 membawa efek yang masif pada pariwisata dan pendukung lainnya. Kontribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten Sleman semula sebesar 20,71% pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan menjadi 13,23% pada bulan September 2020. Keadaan ini merupakan imbas terpuruknya pariwisata dan berpengaruh pada tingkat hunian hotel, restoran, dan penjualan buah tangan yang semula menyerap tenaga kerja secara optimal (Pradana, 2021). Pada awal Covid-19, terdapat sejumlah usaha pariwisata yang tutup total, merumahkan sebagian besar karyawan, dan melakukan PHK. Jumlah usaha yang tutup total terdapat pada Gambar 1.5 di bawah ini :



Gambar 1. 5
Jumlah Jenis Usaha di Bidang Pariwisata Tutup Total Saat Pandemi
Sumber: (Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, 2020)

Penutupan usaha tersebut di antaranya karena adanya penutupan destinasi wisata

dan pembatasan kunjungan, penerapan standar *Clean, Health, Safety, and Environment* (CHSE) belum optimal, belum ada ciri khusus pada masing-masing desa wisata, dan promosi wisata berbasis teknologi informasi yang belum optimal. Kondisi pariwisata mulai berubah pada tahun 2021 dan 2022 ketika pandemi COVID-19 berangsur berubah secara berkala menjadi endemi. Menurut data BPS Kabupaten Sleman, jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2022 mengalami peningkatan 147% dari tahun sebelumnya. Data tersebut juga menunjukkan bahwa kondisi pandemi yang melandai telah meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan nusantara atau domestik. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman selama kurun waktu 10 tahun dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1.6
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sleman Tahun 2014-2025
Sumber: (BPS Kabupaten Sleman 2026)

Berdasarkan Gambar 1.6 tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun secara konsisten. Angka kunjungan tercatat sebesar 7.171.071 orang pada tahun 2022, meningkat menjadi sekitar 8 juta orang pada tahun 2023, dan terus tumbuh pada tahun 2024 serta 2025, didorong oleh pelonggaran mobilitas pascapandemi. Jika dilihat dari destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan dapat diketahui bahwa wisatawan memiliki ketertarikan pada

wilayah tertentu sebagaimana tergambar pada grafik berikut:



Gambar 1.7
Jumlah Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Pilihan Kawasan Tahun 2025
Sumber: (BPS Kabupaten Sleman, 2026)

Menurut Gambar 1.7 tersebut, kawasan Sleman bagian Tengah dan Utara memiliki daya tarik yang memikat pengunjung dan mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang terus meningkat pasca pandemi. Kawasan Utara yang dimaksud pada Gambar tersebut meliputi Kapanewon Cangkringan, Pakem dan Turi. Istilah Kapanewon merupakan nomenklatur penyebutan kecamatan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Pasal 1 angka 7 Pergub No. 25 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Kapanewon/Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten/Kota. Selain kecamatan, terdapat nomenklatur penyebutan kalurahan. Pasal 1 angka 9 Pergub No. 25 Tahun 2019 menyatakan bahwa sebutan *Kalurahan* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merujuk pada kesatuan masyarakat hukum yang terbentuk dari gabungan beberapa padukuhan, dengan batas wilayah yang jelas serta memiliki harta kekayaan sendiri. Dalam struktur pemerintahan, *Kalurahan* berkedudukan langsung di bawah *Kapanewon*. Peta administrasi di bawah ini menunjukkan lokasi wisata di kawasan utara.



Gambar 1. 8
Peta Administratif Kabupaten Sleman
Sumber : (Laboratorium Fak Geografi UGM, 2015)

Ketiga Kapanewon tersebut mengandalkan pertanian buah salak sebagai sumber mata pencarian utama. Namun demikian, seiring rendahnya nilai tukar produk pertanian seperti salak yang menjadi komoditas utama pertanian di Kapanewon Turi, sebagian warga masyarakat mencari alternatif usaha melalui pengembangan desa wisata. Keberadaan desa wisata menjadi alternatif peluang usaha untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan (Marlina, 2017). Dari jumlah keseluruhan desa wisata di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, terdapat 3 (tiga) desa wisata yang berbasis dusun, di mana salah satunya adalah Ekowisata Pancoh yang masuk kategori desa wisata mandiri.

Dilihat dari permasalahan makro ekonomi terkait pertumbuhan pariwisata, sampai saat ini desa wisata belum mampu menaikkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat secara holistik. Data tersebut berkaitan dan bisa diketahui melalui persentase Kepala Keluarga (KK) Miskin di masing-masing Kapanewon se Kabupaten Sleman pada Tabel 1.4. berikut:

Tabel 1. 3
Persentase KK Miskin Per Kapanewon Sleman Tahun 2016-2020

No	Kapanewon	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gamping	7,68	7,85	7,64	7,44	8,16
2	Godean	11,67	10,71	10,21	9,67	10,35
3	Moyudan	13,66	10,97	10,44	9,74	10,45
4	Minggir	18,91	15,38	13,29	12,55	13,31
5	Seyegan	19	17,89	16,3	13,21	13,92
6	Mlati	9,6	8,81	8,38	7,89	8,55
7	Depok	3,22	3,17	3,11	2,88	3,56
8	Berbah	9,54	9,2	8,68	8,06	8,83
9	Prambanan	16,18	13,61	12,53	11,71	12,46
10	Kalasan	8,8	8,52	7,88	7,57	8,24
11	Ngemplak	7,61	7,06	6,61	6,25	7,01
12	Ngaglik	5,81	5,48	5,35	5,07	5,79
13	Sleman	14,37	11,34	9,91	8,78	9,53
14	Tempel	17,18	14,63	12,4	11,46	12,24
15	Turi	16,01	13,27	12,2	11,26	12,02
16	Pakem	7,46	6,74	6,44	6,1	6,97
17	Cangkringan	15,9	13,2	11,53	9,72	10,52
Kabupaten Sleman		10,6	9,48	8,77	8,08	8,79

Sumber: (Dinas Sosial Kabupaten Sleman, 2020)

Menurut tipologi Klassen yang membagi suatu wilayah berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB, terdapat 4 kuadran, yaitu: Kuadran I (wilayah maju dan wilayah cepat tumbuh), Kuadran II (wilayah berkembang cepat), Kuadran III (wilayah maju tapi tertekan), dan Kuadran IV (wilayah relatif tertinggal). Hasil penelitian (S. Sukma et al., 2022) memperlihatkan bahwa Kapanewon Moyudan, Prambanan, Kalasan, Tempel, Turi, dan Cangkringan merupakan kapanewon yang selalu termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal. Di sisi lain, Kecamatan Depok dan Sleman termasuk dalam kategori wilayah cepat maju dan tumbuh. Kondisi ini disebabkan oleh wilayah di Kapanewon yang masuk Kuadran IV bergantung pada sumber daya alam atau pertanian yang masih belum dikembangkan dengan baik sehingga menimbulkan ketimpangan antara wilayah Kabupaten Sleman bagian perbatasan seperti wilayah utara, timur, serta barat dengan wilayah di tengah serta selatan. Terjadinya disparitas di bidang ekonomi antar Kapanewon ini dapat diartikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah belum dirasakan secara

merata oleh seluruh masyarakat (S. Sukma et al., 2022).

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Sleman, selain terkait dengan pertumbuhan ekonomi, juga memberikan dampak budaya dari pariwisata, yaitu terjadinya perubahan perilaku masyarakat di sekitar destinasi wisata. (Asmoro et al., 2020). Terjadi komersialisasi budaya dan meniru budaya lain (*imitate another culture*) (Rohani & Irdana, 2021). Selanjutnya, juga terdapat dampak sosial pariwisata, di antaranya muncul tatanan mata pencarian baru pada masyarakat yang terarah pada sektor pariwisata. Adanya kegiatan pariwisata terjadi perubahan struktur sosial masyarakat lokal dan munculnya dinamika sosial yang tidak dapat dihindari di mana mayoritas masyarakat sebelumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh, penambang dan lainnya (Islami, 2021).

Adanya destinasi wisata di berbagai daerah juga berpengaruh negatif terhadap perubahan lingkungan. Hasil penelitian dampak lingkungan adanya destinasi wisata antara lain: 1) adanya perubahan visual, 2) adanya penumpukan sampah, 3) perubahan kualitas air, dan 4) perubahan lingkungan perairan. Kondisi ini diakibatkan oleh tingginya aktivitas pariwisata yang dilakukan secara massal (Khrisnamurti et al., 2016). Dalam konteks pariwisata di Kabupaten Sleman, keberadaan Gunung Merapi meningkatkan risiko bencana ekologi. Selain itu, Kabupaten Sleman memiliki posisi strategis sebagai wilayah hulu yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peran ini menegaskan pentingnya Sleman dalam menjaga ketersediaan sumber daya air, sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem dan kebutuhan masyarakat di wilayah hilir (Yustina et al., 2017). Berdasarkan sosiologi lingkungan, pariwisata DIY saat ini dianggap belum mencukupi model pengelolaan yang baik dan berkelanjutan sehingga standar keramahan lingkungan yang ada masih rendah (Asmoro et al., 2020). Permasalahan lingkungan lainnya di Kabupaten Sleman yaitu jumlah sampah yang mencapai 738 ton per hari. Sumber sampah terbanyak berupa sampah plastik mencapai 50,67% dan sampah organik

sebesar 13,10% (Syarifudin, 2023).

Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021 (RKPD, 2021) Kabupaten Sleman beberapa permasalahan pariwisata di Kabupaten Sleman di antaranya penerapan *visitor management* yang masih belum optimal dalam meningkatkan pengalaman wisatawan sekaligus melindungi lingkungan serta budaya masyarakat sekitar; belum tersedianya pengelolaan krisis yang efektif guna mencegah potensi krisis pada masa mendatang; masih belum tersedianya sistematis guna menilai kualitas daya tarik wisata; serta pengembangan objek wisata yang terjadi belum mengintegrasikan konsep *creative tourism*, khususnya dalam aspek pengemasan serta pemrograman aspek kreatif, yang mencakup *packaging* dan *creative programming*. Keterpaduan produk kreatif dengan aktivitas pariwisata tidak hanya memperkuat daya tarik destinasi, tetapi juga berkontribusi pada diversifikasi layanan dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kendati terdapat beberapa permasalahan pariwisata di Kabupaten Sleman namun keberadaan desa wisata masih menjadi salah satu andalan untuk menarik jumlah wisatawan yang datang, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing (Wulandari et al., 2018). Desa merupakan aset yang tak ternilai harganya bagi pariwisata. Penduduk desa yang masih berusaha menjaga adat istiadat, akar budaya, dan tradisi kearifan lokal melalui lanskap lingkungan budaya yang memiliki potensi strategis yang dapat dikembangkan menjadi daya minat wisata yang indah, spesifik, murni, langka, natural, serta utuh yang mencerminkan karakter dan ciri asli Indonesia.

Desa wisata hadir untuk menambah variasi tujuan wisata yang lebih dinamis di daerah wisata sehingga pariwisata tidak hanya berfokus pada pertumbuhan *mass tourism*. Dengan adanya desa wisata, sektor berkaitan menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, yaitu pariwisata yang mampu menciptakan lapangan kerja di pedesaan, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, serta berperan dalam mengurangi

kemiskinan (Antara & Arida, 2015). Desa wisata adalah pengembangan dari jenis pariwisata yang melibatkan peran aktif masyarakat setempat (*Community Based Tourism*). Potensi lokal di desa tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menjadi daya tarik yang dapat menarik lebih banyak pengunjung.

Program pengembangan desa wisata ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat, sekaligus memperluas kontribusi desa wisata terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional. Akan tetapi, berdasarkan pandangan Arida, pengembangan desa wisata hingga kini masih dihadang oleh beberapa permasalahan di balik peluang tersebut. Pertama, belum terdapat standar untuk pengkategorian desa wisata yang dijadikan rujukan ketika melaksanakan identifikasi terhadap desa-desa wisata. Hal tersebut berakibat pada pengelolaan desa wisata yang memiliki kecenderungan yang bersifat duplikat dan kurang mengangkat keunikan lokal. Selain itu, belum ada *blueprint* atau cetak biru untuk pengembangan desa wisata. Ini terutama berlaku untuk pengembangan kelembagaan lokal, yaitu pengelola desa wisata (N. S. Arida et al., 2017).

Kemampuan desa wisata untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Sleman menempatkan desa wisata Sleman meraih beberapa penghargaan diantaranya Desa Wisata Pancoh mendapatkan juara 1 (pertama) dengan membawa konsep desa wisata berbasis lingkungan (Ivan, 2022) dalam Lomba Desa dan Kampung Wisata yang diselenggarakan Dinas Pariwisata DIY pada tahun 2022.

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.7 berikut, ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi Desa Wisata Sleman, terutama Pancoh, telah berubah dan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Jumlah kunjungan di Desa Ekowisata Pancoh mengalami

fluktuasi kunjungan. Jika di tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 4.716 sedangkan Tahun 2020 sama sekali tidak ada kunjungan akibat kebijakan pembatasan kunjungan wisatawan namun pada bulan Oktober Tahun 2022 sudah mampu mendekati angka yang sama di Tahun 2019 yaitu sebanyak 4.640 kunjungan wisatawan. Ketertarikan wisatawan berkunjung di desa wisata telah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pada tahun 2022, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman melakukan pengkategorian desa wisata dengan tujuan memastikan keberlanjutan desa wisata dalam mengembangkan dan menjaga kualitas produk ataupun kredibilitasnya, serta bentuk monitoring dan evaluasi kinerja desa wisata. Berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 56/Kep.KDH/A/2022 tentang Desa Wisata Tahun 2022, jumlah Desa Wisata sebanyak 47 diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu: Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri.

Kategori rintisan adalah desa wisata yang baru didirikan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tingkat desa dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai legalitas formal adanya desa wisata. Kategori berkembang, yaitu desa wisata yang masih memerlukan pendampingan dalam proses membangun desa wisata. Kategori desa wisata maju, yaitu desa wisata mampu menyediakan beberapa alternatif tempat wisata; sedangkan desa wisata mandiri telah mampu memenuhi ketersediaan sarana prasarana. Isu strategis yang terjadi pada kategori desa wisata rintisan, yaitu desa wisata tersebut dikembangkan masyarakat sebagai respon menciptakan peluang usaha baru di masa pandemi (Tahun 2020-2022), adanya bantuan pendanaan dan pemanfaatan potensi desa. Masyarakat yang baru merintis desa wisata belum memahami konsep desa wisata, sehingga mereka hanya fokus pada pembuatan objek wisata baru, contohnya kolam renang, taman dan spot foto, belum pernah mendapatkan sosialisasi dan pendampingan, dan kurangnya kelengkapan administrasi, seperti profil, AD/ART, dan SK. Adapun isu strategis untuk desa wisata

selain kategori rintisan, meliputi: 1) minim inovasi dan kolaborasi; 2) kesulitan regenerasi; 3) pencatatan yang masih dalam pembukuan manual (keuangan, notulen rapat, dan kunjungan); 4) kesulitan pemasaran dan branding; dan 5) belum bisa memunculkan keunikan (USP) sehingga atraksinya rawan duplikasi (Dinas Pariwisata Sleman, 2022).

Desa Wisata Ekowisata Pancoh masuk ke dalam kategori desa wisata mandiri dikarenakan komitmennya guna menciptakan desa wisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.. Namun demikian, terdapat berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam mewujudkannya. Hasil klasifikasi desa wisata tahun 2022 yang dilakukan Dinas Pariwisata menemukan bahwa secara kelembagaan Desa Wisata Pancoh sudah memiliki struktur organisasi, banyak SDM yang terlibat dalam pengembangan desa, namun sertifikasi dari SDM yang terlibat masih kurang. Kerjasama dengan berbagai institusi sudah dilakukan terutama Perguruan Tinggi, namun belum melaksanakan kerja sama dengan sektor bisnis. Dalam pelestarian SDA, Desa Wisata Pancoh memberikan himbauan kepada pengunjung beserta sanksinya. Akses menuju desa juga terbilang mudah serta sarana dan prasarana desa tersedia. Pengelola desa wisata juga sudah *melek* digital. Namun dalam hal mitigasi bencana belum terdapat SOP yang tertulis, dan sudah cukup menerapkan CHSE (*Clean, Health, Safety, and Environment*).

Hasil penelusuran kajian tentang desa wisata/ekowisata telah menarik minat para peneliti sejak tahun 1999. Tulisan (Campbell, 1999), misalnya, mengangkat pengembangan ekowisata di Ostional, Kosta Rika, dan potensi manfaatnya bagi masyarakat lokal. Penelitian berikutnya (Villanueva-álvaro et al., 2017) tentang *Rural Tourism: Development, management and sustainability in rural establishments* (Pariwisata pedesaan: Pengembangan, pengelolaan dan keberlanjutan di daerah pedesaan). Jumlah penelitian mengalami peningkatan pada tahun 2020. Beberapa peneliti yang melakukan kajian di antaranya (Yachin & Ioannides, 2020) yang membahas kewirausahaan dalam

pengembangan pariwisata pedesaan bagi usaha mikro di daerah wisata. Kajian tentang stakeholder wisata pedesaan dilakukan (Ma et al., 2020), (Kummitha, 2020). Berikutnya kajian membahas implementasi konsep *community based tourism* dilakukan (Khartishvili et al., 2020) dengan lokus di Armenia dan Georgia, sedangkan tulisan yang membahas strategi pengembangan *community based tourism* terdapat penelitian yang telah dilaksanakan (Hussain et al., 2023) dengan kajian *smart rural mobility and tourism*.

Penelitian tentang *green economy* pada desa wisata telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain oleh (A. M. Sari et al., 2012) tentang Penerapan Konsep *Green Economy* Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu), (Hidayattuloh et al., 2020) mengenai konsep *green economy* merupakan pendekatan untuk mengembangkan desa wisata Cempaka untuk mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan, (Noviarita et al., 2021) melakukan penelitian tentang Pengelolaan Desa Wisata Dengan Konsep *Green Economy* Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Wisata Di Provinsi Lampung dan Jawa Barat) serta (Prayogi et al., 2022) tentang Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran Bali melalui konsep *green economy* dengan basis masyarakat setempat pada masa Covid-19. Para peneliti tersebut melakukan kajian dengan tujuan dan berbagai teori yang digunakan berbeda dengan penelitian ini. Hasil temuan para peneliti tersebut antara lain bahwa potensi dan daya tarik yang ada di desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata dengan konsep *green economy*. Implementasi prinsip-prinsip *green economy* telah dilakukan, khususnya guna menerapkan prinsip keadilan bagi generasi mendatang serta mengelola objek wisata alam tanpa melakukan kerusakan lingkungan. Di kawasan pesisir, karakteristik pemanfaatan ekonomi menunjukkan adanya dua kegiatan ekonomi pokok (perikanan dan pariwisata pantai) yang mengalami permasalahan ketika pemanfaatan sama-

sama tinggi. Hal ini terjadi karena aktivitas masing-masing destinasi wisata belum memiliki ciri khas yang diunggulkan. Karakteristik pemanfaatan kawasan pesisir menunjukkan adanya penurunan kualitas perairan yang antara lain disebabkan oleh permasalahan pencemaran lingkungan.

Kajian tentang desa wisata di Kabupaten Sleman juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan pendekatan teoretis dan analisis yang berbeda-beda. Hasil penelitian desa wisata di Kabupaten Sleman (Dharasta et al., 2017) menggunakan analisis SWOT, disimpulkan bahwa strategi yang perlu dilaksanakan oleh desa wisata di antaranya: a) Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan dengan meningkatkan potensi desa wisata, seperti dengan meningkatkan penghijauan, pemeliharaan hewan ternak, lokasi foto yang menarik, dan jadwal pertunjukan adat atau kesenian lokal. b) Memperluas paket wisata dengan menambah berbagai jenis outbound untuk anak-anak dan dewasa, susur sungai, pemeliharaan hewan ternak (bebek, kambing, sapi, dan ikan); c) Mengorganisir acara untuk menarik wisatawan. Misalnya, atraksi jathilan, wayang, aneka tarian Jawa, dan acara panen hasil bumi.

Penelitian berikutnya menyoroti kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati sebagai bagian dari pengembangan ekowisata (*ecotourism*) pada studi kasus Desa Wisata Ketingan. Temuan penelitian menunjukkan terkait pengelolaan dan pengembangan desa wisata belum sepenuhnya mengacu pada prinsip keberlanjutan pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Kontribusi konstituen lingkungan pada konservasi serta pengembangan ekowisata hingga kini amat positif walaupun bantuan serta partisipasinya belum sepenuhnya optimal dilakukan (Handojo, 2020).

Desa Ekowisata Pancoh berada di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Sleman, Yogyakarta, merupakan lokasi penelitian dari beberapa peneliti dengan tujuan yang

berbeda. Penelitian (Masjhoer & Dzulkifli, 2019) bertujuan untuk mengetahui kepuasan pengunjung serta kinerja Desa Wisata Pancoh melalui aspek atraksi, aksesibilitas, serta amenitas. Berikutnya (Endiyanti & Sarwadi, 2021) mengeksplorasi komponen pengelolaan Desa Wisata Pancoh melalui model ekowisata berbasis masyarakat. (Rohani & Irdana, 2021) meneliti tentang dampak kehidupan sosial budaya masyarakat pasca adanya aktivitas pariwisata di desanya. Selanjutnya (Widianingrum, 2022) bertujuan untuk mengetahui bentuk kontribusi serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pancoh.

Berbagai kajian desa wisata Pancoh di Kabupaten Sleman sebelumnya membahas tentang pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat, tingkat kepuasan wisatawan dan dampak sosial budaya. Namun demikian, belum terdapat kajian tentang penerapan *green economy* di Desa Ekowisata Pancoh yang menggambarkan kondisi desa wisata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keberlanjutan kelestarian lingkungan dan sosial budaya.

Berdasarkan data dan fakta di atas, terdapat kondisi di mana sektor pariwisata telah meningkatkan penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah serta membuka peluang kerja di berbagai sektor usaha. Adanya desa wisata menjadi alternatif peluang guna mengembangkan usaha di luar sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan serta nilai-nilai sosial budaya. Sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut secara mendalam tentang penerapan kebijakan *green economy* di Desa Wisata Pancoh, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2. Identifikasi Masalah.

Industri pariwisata, tak terkecuali wisata pedesaan, merupakan sektor yang penting dalam transisi pengembangan *green economy*. Berdasarkan data BPS tahun 2022, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2021, studi klasifikasi desa wisata

yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2022, dan penelitian terdahulu sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang tertera diketahui permasalahan di Desa Ekowisata Pancoh sebagai berikut:

1. Keberadaan Desa Ekowisata Pancoh belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kunjungan wisatawan secara keseluruhan di Kapanewon Turi pada tahun 2022, di mana Desa Ekowisata Pancoh termasuk di dalamnya, menempati urutan terendah dari tiga Kapanewon Sleman bagian utara.
2. Standar keramahan lingkungan masih rendah dan masih terdapat timbulan sampah, serta penurunan kualitas air dan lingkungan perairan.
3. Terjadi perubahan perilaku masyarakat, komersialisasi budaya, dan meniru budaya lain sebagai dampak budaya pariwisata
4. Belum terdapat model standar yang menjadi acuan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan (*sustainable*) dalam hal penerapan *visitor management* guna memaksimalkan pengalaman rekreasi berbasis konservasi, wisata berbasis budaya, unsur kreativitas dalam paket wisata yang terintegrasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mitigasi bencana, sertifikasi kompetensi SDM pengelola desa ekowisata, dan tidak ada kerja sama dengan pihak swasta selaku pemangku kepentingan dalam pengelolaan Desa Ekowisata Pancoh.

1.3. Rumusan Masalah.

Uraian persoalan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Ekowisata Pancoh baik di bidang ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dan pengelolaannya perlu dikaji lebih mendalam dengan konsep *green economy*. Permasalahan penelitian berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan kebijakan *green economy* dalam mewujudkan desa wisata

berkelanjutan di Pancoh, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat penerapan kebijakan *green economy* dalam mewujudkan desa wisata berkelanjutan di Pancoh, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana rumusan model usulan/rekomendasi penerapan kebijakan *green economy* dalam mewujudkan desa wisata berkelanjutan di Pancoh, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.4. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan kebijakan *green economy* dalam mewujudkan desa wisata berkelanjutan di Pancoh, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan kebijakan *green economy* dalam mewujudkan desa wisata berkelanjutan di Pancoh, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Merumuskan model usulan/rekomendasi penerapan kebijakan *green economy* dalam mewujudkan desa wisata berkelanjutan di Pancoh, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5. Manfaat Penelitian.

1.5.1. Manfaat Teoritis.

1. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan Administrasi Publik terutama kajian tentang implementasi/penerapan kebijakan dengan konsep *green economy* dalam konteks pengelolaan desa wisata.
2. Penelitian ini menambah literatur tentang pendekatan interdisipliner antara kebijakan publik, *green economy*, dan pariwisata berkelanjutan.

1.5.2. Manfaat Guna Laksana

1. Bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sleman, menjadi rekomendasi dalam melakukan kajian perubahan Perda Desa Wisata dengan memasukkan substansi *green economy* dan memberikan insentif bagi Desa Wisata yang menerapkannya.
2. Bagi Pemerintah Kalurahan Girikerto, Turi, Sleman, rekomendasi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang mendukung kebijakan *green economy* adalah pengaturan zonasi wilayah dan pendampingan pertanian organik dan *integrated farming* yang mendukung Desa Wisata.
3. Bagi Pengelola Desa Ekowisata Pancoh dalam meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan tentang pengelolaan sampah dan biogas, serta penyediaan fasilitas pendukung layanan pariwisata, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, dan edukasi serta advokasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.
4. Bagi Pemerintah Daerah, Kalurahan, Akademisi, Swasta, NGO/LSM dan Media Massa dalam merumuskan kolaborasi pengelolaan desa ekowisata berkelanjutan.
5. Bagi masyarakat, menjadi saran masukan dalam meningkatkan partisipasinya sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Desa Ekowisata Pancoh.